



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BNN 2015 - 2019



Jakarta, 11 Februari 2016

GRAND DESIGN & ROAD MAP RB 2010-2025

PERPRES NO. 81 TAHUN 2010

GRAND DESIGN RB 2010-2025

ROAD MAP RB
2010-2014

RMRB
2015-2019

RMRB
2020-2024

PERMEN PAN
DAN RB NO. 20
TAHUN 2010

PERMEN PAN
DAN RB NO. 11
TAHUN 2015

Pengertian

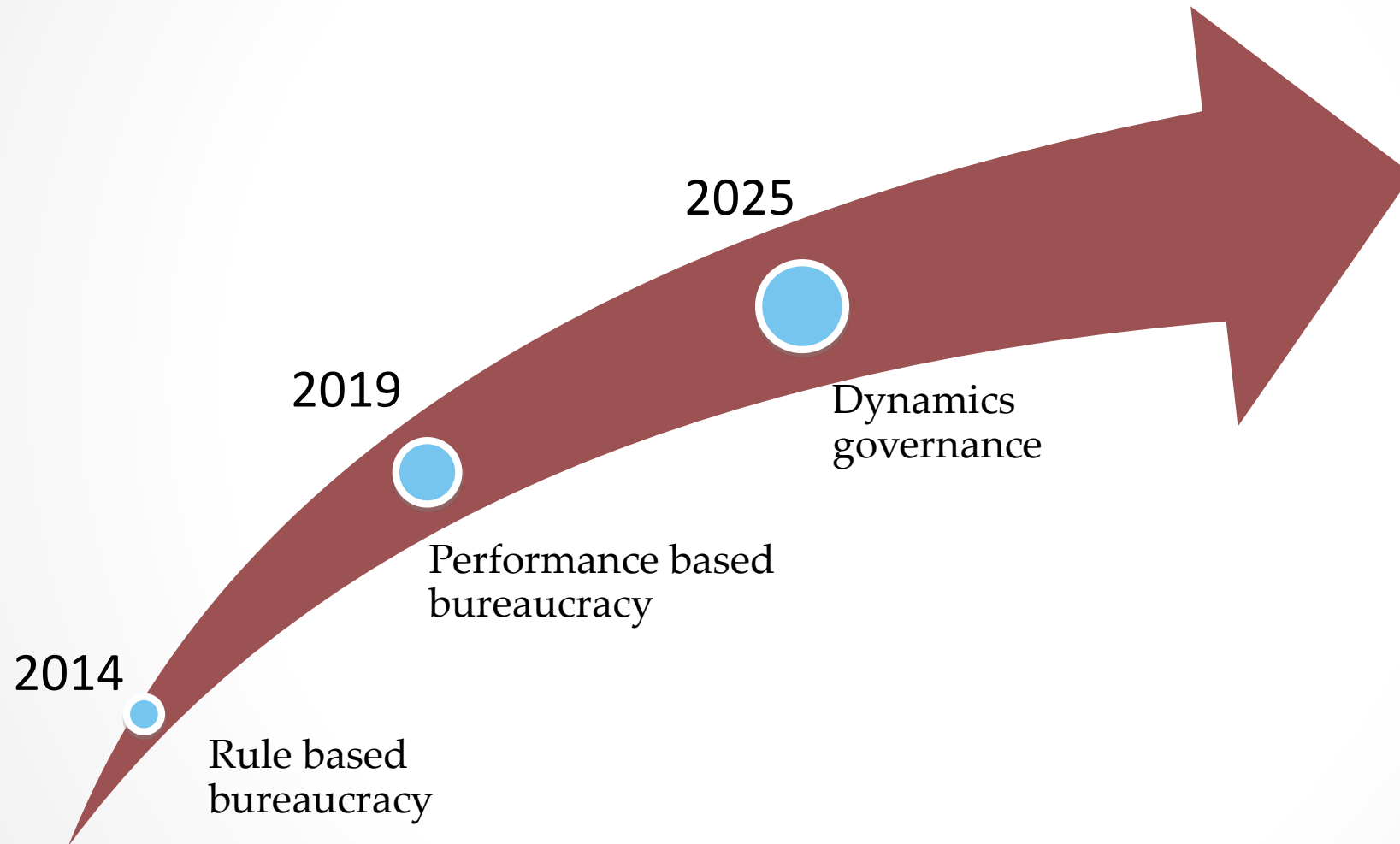
- GRAND DESIGN Reformasi Birokrasi

Rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

- ROAD MAP Reformasi Birokrasi

Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025



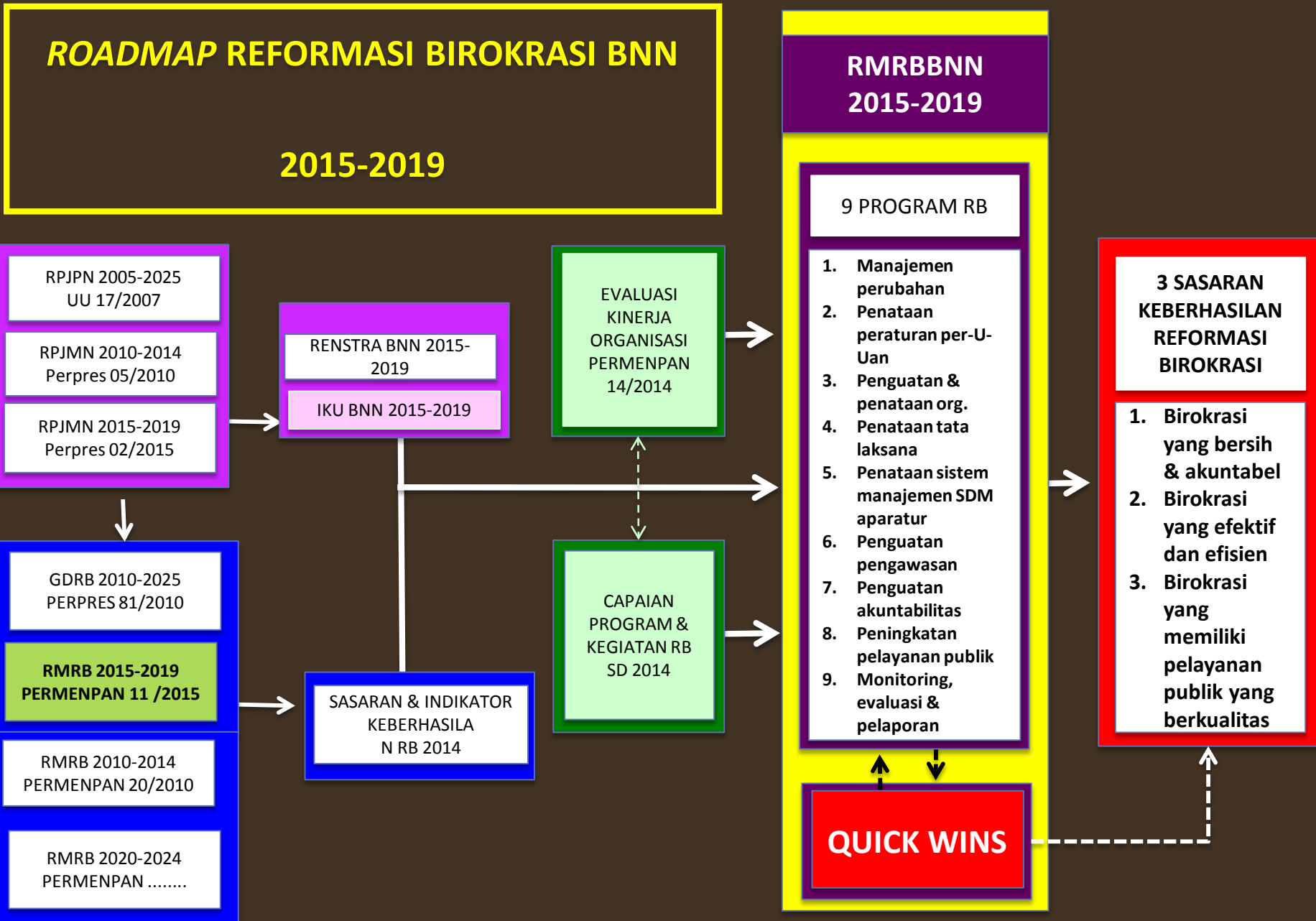
Sasaran Road Map RB Tahun 2010 - 2014

1. Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran Road Map RB Tahun 2015 - 2019

1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat program yang telah tercapai di periode 2010 – 2014
2. Melanjutkan program yang belum dilaksanakan di periode 2010 – 2014
3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya
4. Memperluas cakupan pelaksanaan RB
5. Menambahkan program baru dalam quick win

POLA PIKIR PENYUSUNAN



Keputusan Kepala Tentang Tim RB BNN

- a. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN
Tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan BNN Periode 2015 – 2019
- b. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN
Tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi BNN Periode 2015 – 2019
- c. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/148/IV/KA/OT.01/2015/BNN
Tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BNN Periode 2015 – 2019
- d. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/182 /V/KA/OT.01/2015/BNN
Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019

Surat Perintah Kepala Tentang Tim Pokja Pelaksanaan 8 Area Perubahan

- a. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1239/IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Penguatan Pengawasan di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- b. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1240/IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- c. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1241/IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- d. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1242 /IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- e. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1243 /IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- f. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1244 /IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- g. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1245 /IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di Lingkungan BNN Periode 2015-2019
- h. Surat Perintah Kepala Nomor : Sprin/1246 /IV/KA/OT.01/2015/BNN Tentang Tim Pokja Penataan Tatalaksana di Lingkungan BNN Periode 2015-2019

Road Map

Periode 2010-2014 dan Periode 2015-2019

No	Periode 2010-2014 (Sesuai PMPRB)	No	Periode 2015-2019
1	Program Manajemen Perubahan	1	Program Manajemen Perubahan
	a. Tim Reformasi Birokrasi		a. Tim Reformasi Birokrasi
	✓ Telah terbentuk Tim RB		✓ Telah terbentuk Tim RB
	✓ Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan sebagian besar tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi		✓ Pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi membuat laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim RB 2015-2019
	✓ Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sebagian kecil rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		✓ Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi untuk ditindaklanjuti

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	b. Road Map Reformasi Birokrasi		b. Road Map Reformasi Birokrasi
	✓ Penyusunan Road Map Periode 2010-2014 dan telah diformalkan		✓ Penyusunan Konsep Road Map Periode 2015-2019
	✓ Road Map telah mencakup 8 area perubahan		✓ Road Map telah mencakup 8 area perubahan
	✓ Road Map telah mencakup "quick win" Tahun 2010		✓ Penyusunan <i>road map</i> mencakup <i>quick win</i> 2015 - 2019
	✓ Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi		✓ Penyusunan <i>road map</i> dengan keterlibatan seluruh Satuan Kerja
	✓ Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada sebagian besar anggota organisasi		✓ Sosialisasi <i>road map</i> dan <i>quick win</i> BNN periode 2015-2019

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
	✓ Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik		✓ Perencanaan dan pengorganisasian PMPRB
	✓ Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi		✓ Sosialisasi PMPRB kepada seluruh pegawai dan pimpinan
	✓ Sebagian kecil Tim Aesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan		✓ Pelatihan bagi seluruh Tim Assessor PMPRB
	✓ Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain		✓ Penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB
	✓ Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi		✓ Koordinator assessor PMPRB melakukan reviu secara keseluruhan terhadap kertas kerja assessor sebelum menyusun kertas kerja instansi

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	✓ Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas		✓ Seluruh Koordinator Assessor bersepakat atas pengisian kertas kerja sebelum penilaian PMPRB (Prosedur kerja sesuai ketentuan)
	✓ Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)		✓ Menyusun Tindak lanjut hasil kerja tim assessor dalam bentuk Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja tim assessor untuk disosialisasikan
	d. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		d. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
	✓ Sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi		✓ Seluruh Pimpinan BNN terlibat aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birkorasi
	✓ Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai		✓ Menyiapkan media komunikasi untuk seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan Kesadaran pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	✓ Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i>		✓ Penetapan <i>agent of change</i> atau <i>role model</i>
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	Penataan Peraturan Perundang-undangan
	a. Harmonisasi		a. Harmonisasi
	✓ Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron		✓ Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan kepala
	✓ Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai		✓ Revisi Peraturan Kepala
			✓ Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan kepala yang dipandang menghambat pelayanan

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan		b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan kepala
	✓ Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi namun belum diimplementasikan		✓ Sistem Pengendalian penyusunan peraturan kepala di lingkungan BNN telah mengatur seluruh persyaratan dalam penyusunan peraturan kepala
	✓ Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala		✓ Evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan kepala dilakukan secara berkala

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
	<p>a. Evaluasi</p> <p>Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.</p> <p>Telah dilakukan evaluasi untuk menilai Jenjang organisasi, Duplikasi fungsi, Satu kelompok organisasi tetapi berbeda tujuan, Dualisme atasan, Struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan, Kesesuaian organisasi dengan struktur mandat, tetapi evaluasi tersebut baru pada sebagian unit organisasi.</p> <p>Terdapat evaluasi untuk menganalisis Tumpang tindih fungsi dengan instansi lain, serta Kemampuan organisasi untuk adaptif dengan perubahan lingkungan strategis.</p>		<p>a. Evaluasi</p> <p>Melakukan evaluasi atas organisasi dengan penilaian berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketepatan fungsi dan ukuran organisasi b)Jenjang organisasi c)Satu kelompok organisasi tetapi berbeda tujuan d)Struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan e)Kesesuaian organisasi dengan struktur mandat f) Tumpang tindih fungsi dengan instansi lain g)Kemampuan organisasi untuk adaptif dengan perubahan lingkungan strategis

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	<p>b. Penataan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi 		<p>b. Penataan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tindak lanjut hasil evaluasi organisasi untuk penataan organisasi <ul style="list-style-type: none"> a) Penambahan fungsi penyelidikan dan penyidikan di BNNKabupaten/Kota b) Penambahan 29 BNNKabupaten/Kota setiap tahun c) Penambahan subsatker bidang rehabilitasi di BNNP dan BNN Kabupaten/Kota d) Penggabungan subsatker pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNNP, BNNkabupaten/Kota e) Penambahan Tempat Rehabilitasi setiap tahun f) Pembangunan Sarana Kantor BNN, BNNP, dan BNNK/Kota g) Penambahan jabatan fungsional untuk Penyidik, Penyuluh, dan Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi h) Penataan organisasi dengan berdasarkan hasil evaluasi organisasi

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
4.	Program Penataan Tatalaksana	4.	Program Penataan Tatalaksana
	a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)		a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
	✓ Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		✓ Menetapkan peta proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker
	✓ Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP		✓ Seluruh Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
	✓ Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)		✓ Seluruh unit organisasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Prosedur operasional tetap (SOP)
	✓ Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP		✓ Evaluasi telah dilaksanakan berdasarkan analisis efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan SOP

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	b. E-Government		b. E-Government
	✓ Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi		✓ Perencanaan pengembangan <i>e-government</i> yang terintegrasi di BNN (secara reguler)
	✓ Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi namun belum terintegrasi		✓ Proses Pengembangan <i>e-government</i> telah terintegrasi di lingkungan BNN
	✓ Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat namun belum terintegrasi		✓ Pengembangan <i>e-government</i> dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah terintegrasi dalam bentuk pemberian informasi (baik dalam bentuk website, sistem pengaduan)
	✓ Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) namun belum terintegrasi		✓ Pengembangan <i>e-government</i> dalam rangka pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk kegiatan transaksional telah terintegrasi

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	c. Keterbukaan Informasi Publik		c. Keterbukaan Informasi Publik
	✓ Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)		✓ Adanya Kebijakan pimpinan tentang penggolongan dan tata cara informasi yang dapat disampaikan kepada public
	✓ Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses		✓ Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
	✓ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala		✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, untuk dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan secara berkala

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
			d. Penerapan Sistem Kearsipan Yang Handal
			✓ Penenerapan ilmu kearsipan dalam memperlakukan arsip
			✓ Penerapan deskripsi standar kearsipan
			✓ Terciptanya koordinasi yang baik antar unit dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip
			✓ Tersedianya ruang pengolahan arsip
			✓ Tersedianya peralatan pendukung dalam penataan arsip
			✓ Tersedianya SDM kearsipan yang profesional

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
5.	Program Penataan Sistem Manajemen SDM	5.	Program Penataan Sistem Manajemen SDM
	a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi		a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
	✓ Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan		✓ Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di seluruh jabatan yang ada di BNN (e-formasi 100%)
	✓ Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi		✓ Menghitung rencana kebutuhan pegawai untuk seluruh unit organisasi secara berkala
	✓ Terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai		✓ Melakukan rencana redistribusi pegawai
	✓ Terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun		✓ Memproyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun mendatang
	✓ Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi		✓ Menghitung formasi jabatan yang mendukung kinerja utama organisasi dan telah diformalkan pada seluruh unit organisasi

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN		b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
	✓ Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb)		✓ Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media
	✓ Pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.		✓ Sistem pendaftaran secara online dan <i>realtime</i>
	✓ Terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.		✓ Persyaratan jelas, tidak diskriminatif (persyaratan objektif)
	✓ Proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.		✓ Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN (sesuai aturan yang berlaku)
	✓ Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah		✓ Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka dan mudah diakses

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
	✓ Terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan		✓ Menetapkan standar kompetensi jabatan
	✓ Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai		✓ Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana assesment center untuk melaksanakan assesment kepada seluruh pegawai
	✓ Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai		✓ Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
	✓ Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi		✓ Menyusun rencana pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
	✓ Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		✓ Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi (Pemberian tugas belajar, tugas diklat dll)
	✓ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala		✓ Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka		d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
	✓ Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan		✓ Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan
	✓ Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama		✓ Penerapan keterbukaan promosi jabatan pimpinan tinggi hingga tingkat nasional
	✓ Pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif		✓ Penerapan promosi yang obyektif dan kompetitif
	✓ Ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen		✓ Pelaksanaan promosi terbuka oleh panitia seleksi yang independen
	✓ Tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb		✓ Penerapan keterbukaan informasi atas hasil setiap tahapan seleksi

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	e. Penetapan kinerja individu		e. Penerapan penilaian kinerja individu
	✓ Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai		✓ Penerapan penetapan kinerja individu oleh seluruh pegawai BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota
	✓ Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		✓ Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) diberlakukan kepada seluruh pegawai
	✓ Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya		✓ Pengukuran kinerja individu agar memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
	✓ Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran		✓ Mengukur kinerja individu secara periodik (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	✓ Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala		✓ Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
	✓ Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai		✓ Penerapan sistem penilaian kinerja individu untuk pengembangan karir seluruh pegawai (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
	✓ Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai		✓ Penerapan sistem penilaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan kinerja (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
			✓ Perumusan dan penetapan kebijakan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
	✓ Terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku		✓ Penerapan kebijakan mengenai aturan disiplin pegawai
	✓ Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi		✓ Mengimplementasikan aturan disiplin pegawai ke seluruh unit organisasi
	✓ Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala		✓ Monitoring dan evaluasi penerapan aturan disiplin pegawai secara berkala
	✓ Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi		✓ Penerapan pemberian sanksi dan imbalan atas pelaksanaan penerapan aturan disiplin kepada seluruh unit organisasi

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	g. Pelaksanaan evaluasi jabatan		g. Pelaksanaan evaluasi jabatan
	✓ Terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan		✓ Revisi faktor jabatan tahun 2016
	✓ Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan		✓ Menetapkan peta jabatan baru tahun 2016
	✓ Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan		✓ Menetapkan kelas jabatan pada tahun 2016
	h. Sistem Informasi Kepegawaian		h. Sistem Informasi Kepegawaian
	✓ Tidak terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan		✓ Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang memenuhi kebutuhan pegawai mengenai data kepegawaian tahun 2015
	✓ Pegawai tidak dapat mengakses sistem informasi kepegawaian		✓ Memberikan Akses penggunaan sistem informasi pegawai
	✓ Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian		✓ Pemutakhiran data SIMPEG setiap tahun
	✓ Tidak terdapat sistem informasi kepegawaian yang digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM		✓ Penggunaan sistem informasi kepegawaian sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
6.	Penguatan Akuntabilitas	6.	Penguatan Akuntabilitas
	a. Keterlibatan Pimpinan		a. Keterlibatan Pimpinan
	✓ Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		✓ Penyusunan renstra yang melibatkan pimpinan
	✓ Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		✓ Menetapkan kinerja individu BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota dengan keterlibatan pimpinan secara langsung
	✓ Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		✓ Penggunaan aplikasi SIMPEG dalam rangka Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan tahun 2016

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
	✓ Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		✓ Alokasi 20% Anggaran untuk Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat yang dilakukan setiap unit organisasi
	✓ Terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja		✓ Pembuatan pedoman akuntabilitas kinerja
	✓ Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik		✓ Merancang sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang mudah diimplementasikan dan terintegrasi
	✓ Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi		✓ sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi
	✓ Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan		✓ Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara rutin
			✓ Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
7.	Penguatan Pengawasan	7.	Penguatan Pengawasan
	a. Gratifikasi		a. Gratifikasi
	✓ Belum ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi		✓ Penetapan Perka/19/XII/2014/BNN Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan BNN
	✓ Belum dilakukan public campaign		✓ Sosialisasi penerapan kebijakan gratifikasi tahun 2016
	✓ UPG tidak melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi		✓ Pelaporan secara berkala dari Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
	✓ Tidak terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		✓ Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan gratifikasi setiap tahun
	✓ Tidak terdapat laporan tindak lanjut		✓ Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan gratifikasi setiap tahun

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	b. Penerapan SPIP		b. Penerapan SPIP
	✓ Terdapat peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP		✓ Penerapan kebijakan tentang SPIP
	✓ Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian		✓ Pembangunan lingkungan pengendalian diseluruh satuan kerja
	✓ Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko		✓ Seluruh satuan kerja melakukan identifikasi penilaian resiko atas organisasi
	✓ Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		✓ Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi setiap tahun
	✓ SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait		✓ Sosialisasi SPIP terhadap pihak terkait
	✓ Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala		✓ Penerapan sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	c. Pengaduan Masyarakat		c. Pengaduan Masyarakat
	✓ Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan		✓ Penyusunan Perka tentang kebijakan penanganan pengaduan masyarakat
	✓ Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat		✓ Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat di seluruh satuan kerja
	✓ Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti		✓ Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh seluruh satuan kerja
	✓ Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala		✓ Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala oleh seluruh satuan kerja
	✓ Terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat		✓ Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala oleh seluruh satuan kerja

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	d. Pengelolaan whistle blowing system		d. Pengelolaan whistle blowing system
	✓ Terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System		✓ Penetapan Perka tentang pedoman pelaksanaan sistem pelanggaran pelaporan (whistle blowing system) di lingkungan BNN Perka/16/XII/2014/BNN)
	✓ Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi		✓ Sosialisasi kebijakan whistle blowing system ke seluruh satuan kerja
	✓ Terdapat kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan		✓ Pengimplementasian whistle blowing system ke seluruh satuan kerja
	✓ Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System		✓ Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi whistle blowing system ke seluruh satuan kerja
	✓ Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti		✓ Tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi whistle blowing system

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	e. Penanganan Benturan Kepentingan		e. Penanganan Benturan Kepentingan
	✓ Terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan		✓ Penetapan Perka/17/XII/2014/BNN Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan BNN
	✓ Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi		✓ Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan ke seluruh satuan kerja
	✓ Tidak terdapat penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		✓ Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan ke seluruh satuan kerja
	✓ Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi		✓ Evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan ke seluruh satuan kerja
	✓ Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti		✓ Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	f. Pembangunan Zona Integritas		f. Pembangunan Zona Integritas
	✓ Tidak ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan		✓ Penetapan Kep/523/XI/KA/IR.00.00/2014/BNN Tentang Penetapan Unit Kerja Di Lingkungan Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN sebagai unit kerja berpredikat wilayah bebas korupsi Tahun 2014
	✓ Terdapat Dokumen Pencanaan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan		✓ Implementasi zona integritas pada satuan kerja tertentu
	✓ Belum ada pembangunan zona integritas		✓ Pembangunan zona integritas secara bertahap
	✓ Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi		✓ Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan secara berkala
	✓ Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK		✓ Penetapan unit kerja yang ditetapkan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	✓ Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir		✓ Pemberian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan
	✓ Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas		✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM APIP
	✓ Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran		✓ Peningkatan dukungan anggaran APIP
	✓ Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko		✓ Penataan fungsi pengawasan internal agar berfokus pada client dan audit berbasis risiko

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	h. Peningkatan pengawasan		h. Peningkatan pengawasan
			✓ Penilaian rencana pembuatan RKAKL setiap tahun oleh inspektorat utama
			✓ Peningkatan opini BPK dalam laporan keuangan BNN
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	a. Standar Pelayanan		a. Standar Pelayanan
	✓ Terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan		✓ Implementasi kebijakan mengenai standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan
	✓ Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan		✓ Memaklumkan standar pelayanan atas semua jenis pelayanan

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	✓ Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan		✓ Penerapan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
	✓ Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders		✓ Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders
	✓ Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala		✓ Reviu berkelanjutan terhadap standar pelayanan dan SOP secara berkala
	b. Budaya Pelayanan Prima		b. Budaya Pelayanan Prima
	✓ Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima		✓ Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
	✓ Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)		✓ Ketersediaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	✓ Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		✓ Penerapan sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
	✓ Tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu		✓ Pengembangan layanan terpadu/terintegrasi
	✓ Terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan		✓ Pengembangan Inovasi Layanan
	c. Pengelolaan Pengaduan		c. Pengelolaan Pengaduan
	✓ Telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka		✓ Menyediakan media untuk pengaduan pelayanan secara terbuka
	✓ Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya		✓ Implementasi SOP tentang pengaduan pelayanan secara komprehensif

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	✓ Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan		✓ Operasionalisasi unit pengelola pengaduan
	✓ Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		✓ Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
	✓ Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala		✓ Melakukan evaluasi atas penanganan secara berkala
	d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	✓ Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala		✓ Melakukan survey kepuasan kepada masyarakat secara berkala
	✓ Tidak tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah		✓ Menyediakan media yang memudahkan akses data hasil survey secara mudah
	✓ Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		✓ Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
	e. Pemanfaatan Teknologi Informasi		e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
	✓ Ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan		✓ Menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian setiap pelayanan
	✓ Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		✓ Penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di seluruh satuan kerja
	✓ Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus		✓ Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan terhadap penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

No	Periode 2010-2014	No	Periode 2015-2019
9.	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9.	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	✓ Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN		✓ Monitoring melalui pertemuan-rutin baik pada tingkat pengarah, pelaksana atau kelompok kerja
	✓ Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN (setiap tahun		✓ Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat
	✓ Evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN (pada tahun 2014)		✓ Pengukuran target Road Map dan relisasinya
			✓ Evaluasi pada tingkat unit kerja, pengarah atau pelaksana

PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2011

PENGERTIAN QUICK WINS

- ▶ Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
- ▶ Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut.
- ▶ Quick wins untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organization quick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins.



**KONSEP TARGET
QUICK WINS 2015**

► TAHUN 2015

1. Rehabilitasi 100.000 penyalah guna dan pecandu narkoba
2. Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta aset hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebesar 20% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
3. Terselenggaranya sistem pelaporan keuangan berbasis Akrual
4. Legalitas Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN
5. Peningkatan jumlah tempat layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba
6. Penambahan ruang lingkup MDMA pada ISO 17025 di Balai Laboratorium Narkoba BNN
7. Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota
8. Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian
9. Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 50 %

► TAHUN 2016

1. Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 60 %
2. Menyediakan satu sarana dan prasarana pasca rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba yang telah direhabilitasi di Lido Bogor
3. Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota
4. Terakreditasnya Balai Diklat BNN
5. Realisasi pengembangan informasi website BNN sebesar 50%
6. Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta aset hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebesar 30% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
7. Operasionalisasi Loka Lampung

► TAHUN 2017

1. Tersedianya tenaga penyuluh narkoba melalui proses inpassing sebanyak 70 orang
2. Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota
3. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi dan pasca rehabilitasi di tingkat BNNP 50%
4. Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta aset hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebesar 40% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
5. Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 70 %
6. Operasionalisasi Loka Sumatera Utara

► TAHUN 2018

1. Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota
2. Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta aset hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebesar 50% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
3. Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 75 %
4. Peningkatan jumlah produk hukum P4GN yang diundangkan 7 rancangan

► TAHUN 2019

1. Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota
2. Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta aset hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebesar 60% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
3. Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 80 %
4. Pengembangan balai pendidikan dan pelatihan BNN menjadi pusat pendidikan dan pelatihan

Sekian

Terima kasih